

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Konsep Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan suatu indeks komposit yang juga merupakan indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representative. IPM diperkenalkan pertama kali pada tahun 1990 oleh UNDP (United Nation Development Programme,). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga komponen yang dianggap mendasar bagi manusia dan secara operasional mudah dihitung untuk menghasilkan suatu ukuran yang merefleksikan upaya pembangunan manusia.

Menurut BPS (2011) Indeks Pembangunan Manusia merupakan suatu jawaban untuk menilai tingkat kinerja pembangunan manusia secara keseluruhan dari tingkat pencapaian pembangunan manusia. Indeks Pembangunan Manusia. Menurut Mulyadi (2014) merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan disuatu wilayah. Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, indeks ini mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk. Karena hanya mencakup tiga komponen, maka IPM harus dilihat sebagai penyederhanaan dari realitas yang kompleks dari luasnya dimensi

pembangunan manusia. Oleh karena itu, pesan dasar IPM perlu dilengkapi dengan kajian dan analisis yang dapat mengungkapkan dimensi-dimensi pembangunan manusia yang penting lainnya (yang tidak seluruhnya dapat diukur) seperti kebebasan politik, kesinambungan lingkungan, dan pemerataan antar generasi.

IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka umur harapan hidup. Untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli (*Purchasing Power Parity*) (BPS, 2017).

IPM kemudian disempurnakan oleh *United Nation Development Programme*, alasan penyempurnaan tidak lain karena manusia adalah ukuran keberhasilan dari pembangunan. Sehingga ukuran bobot manusia saja tidaklah cukup, dan karenanya diperlukan penggabungan antara pencapaian penghasilan dengan kondisi fisik dan non fisik manusia. Alasannya pembangunan manusia adalah pembentukan kemampuan manusia yang berasal dari peningkatan kesehatan, keahlian dan ilmu pengetahuan (Subandi, 2014)

Adapun komponen-komponen IPM menurut UNDP sebagai berikut:

- 1) Angka Harapan Hidup (AHH)

AHH adalah rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang selama hidup. Angka harapan hidup dihitung menggunakan 16 pendekatan tidak langsung (*Indirect Estimation*). Ada dua jenis data yang digunakan dalam penghitungan Angka harapan hidup yaitu Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH). Besarnya nilai maksimum dan nilai minimum untuk masing-masing komponen ini merupakan nilai besaran yang telah disepakati oleh semua negara (187 negara di dunia). Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun. Angka ini diambil dari standar UNDP.

2) Tingkat pendidikan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan dua indikator, yaitu rata-rata lama sekolah (*Mean Years Schooling*) dan angka melek huruf. Rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberikan bobot. Rata rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua per tiga. Untuk penghitungan indeks pendidikan, dua batasan dipakai sesuai kesepakatan beberapa negara. Batas maksimum untuk angka melek huruf, adalah 100 sedangkan batas minimum 0 (nol). Hal ini menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis, dan nilai nol mencerminkan kondisi sebaliknya. Sementara batas maksimum untuk rata-rata lama sekolah adalah 15 tahun dan

batas 17 minimum sebesar 0 tahun. Batas maksimum 15 tahun mengindikasikan tingkat pendidikan maksimum setara lulus Sekolah Menengah Atas.

3) Standar Hidup Layak

Selanjutnya dimensi ketiga dari ukuran kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak. Dalam cakupan lebih luas standar hidup layak menggambarkan tingkat kesejahteraan yang dinikmati oleh penduduk sebagai dampak semakin membaiknya ekonomi sedangkan BPS dalam memperhitungkan standar hidup layak menggunakan rata-rata belanja perkapita riil.

2.1.1.1 Metode Perhitungan IPM dan Komponennya

Menurut Badan Pusat Statistik (2017), Penyusunan untuk setiap komponen IPM dapat dilakukan dalam beberapa tahap yaitu:

1) Tahapan pertama penghitungan IPM adalah menghitung indeks masing masing komponen IPM (kesehatan, pengetahuan, dan standar hidup layak) dengan hubungan matematis sebagai berikut:

$$\text{Indeks } (X_i) = (X_i - X_{\min}) / (X_{\max} - X_{\min}) \dots \dots \dots (1)$$

Keterangan:

X_i = Indikator komponen IPM ke-i ($i = 1, 2, 3$)

$X_{\max}$ = Nilai maksimum X_i

$X_{\min}$ = Nilai minimum X_i

2) Tahapan kedua penghitungan IPM adalah menghitung rata-rata sederhana dari masing-masing indeks X_i dengan hubungan matematis:

$$\text{Indeks Pembangunan Manusia (IPM)} = 1/3 X_i = 1/3 (X_1 + X_2 + X_3) \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

X1 = Indeks angka harapan hidup

X2 = $\frac{2}{3}$ (Indeks melek huruf) + $\frac{1}{3}$ (Indeks rata-rata lama sekolah)

X3 = Indeks konsumsi per kapita yang disesuaikan.

2.1.1.2 Manfaat Indeks Pembangunan Manusia

IPM dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk mengalihkan fokus perhatian para pengambil keputusan, media, dan organisasi non pemerintah dari penggunaan statistik ekonomi biasa, agar lebih menekankan pada pencapaian manusia. IPM diciptakan untuk menegaskan bahwa manusia dan segenap kemampuannya seharusnya menjadi kriteria utama untuk menilai pembangunan sebuah negara, bukannya pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mempertanyakan pilihan-pilihan kebijakan suatu negara. Bagaimana dua negara yang tingkat pendapatan perkapitanya sama dapat memiliki IPM yang berbeda.
3. Untuk memperlihatkan perbedaan di antara negara-negara, di antara provinsi-provinsi (atau negara bagian), di antara gender, kesukuan, dan kelompok sosial ekonomi lainnya. Dengan memperlihatkan disparitas atau kesenjangan di antara kelompok-kelompok tersebut, maka akan lahir berbagai debat dan diskusi di berbagai negara untuk mencari sumber masalah dan solusinya.

2.1.2 Konsep Kemiskinan

Kemiskinan masih menjadi masalah terbesar di dunia hingga awal milenium, dilaporkan sekitar seperenam populasi penduduk atau sekitar satu miliar orang hidup dalam kemiskinan. Mereka berjuang untuk bertahan hidup.

Mereka mengalami masalah seperti ; kekurangan gizi, kesehatan, air dan sanitasi, tempat tinggal dan kebutuhan dasar lainnya untuk mempertahankan hidup. Karena itu, dalam rangka mengakhiri kemiskinan, terdapat 191 negara anggota PBB menandatangani Millennium PBB yang bertujuan untuk pembangunan (MDGs) pada tahun 2000. MGDs bertujuan memberantas kemiskinan yang ekstrim dan kelaparan yang dialami.

Demi mencapai tujuan MGDs, telah diatur untuk mengurangi setengah proporsi orang hidup dengan kurang dari satu dolar per hari pada tahun 2015. Bila target ini tercapai, aka ada kesempatan untuk mengakhiri kemiskinan ekstrim pada tahun 2025 (Sach, 2005). Ini berarti bahwa, kemiskinan menjadi tantangan terbesar masyarakat global. Tantangan terbesar untuk mengentaskan kemiskinan dapat tercermin melalui kemiskinan kontemporer situasi di Indonesia di mana sejumlah besar orang hidup di bawah garis kemiskinan.

Meskipun perdebatan tentang efektivitas pemulihan ekonomi, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa pada tahun 1998-2005 terjadi penurunan tingkat kemiskinan. Tahun 2002 tercatat sebagai penurunan kemiskinan di perkotaan maupun pedesaan sejak tahun 1984,dengan rincian kemiskinan nasional 9,8 %, perkotaan 4,2 % dan pedesaan tercatat 14,2 % (Suryahadi dkk., 2006).

Namun belakangan ini, belum ada prestasi yang signifikan dalam mengurangi jumlah penduduk miskin dan bahkan sejak tahun 2005 jumlah penduduk miskin telah meningkat secara signifikan (INFID, 2007). Sejak program-program pengentasan kemiskinan digiatkan, jumlah penduduk miskin (penduduk dengan pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan)

secara perlahan berhasil diturunkan jumlahnya. Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2011 sebesar 30,02 juta orang (12,49 persen).

Dibandingkan penduduk miskin pada bulan Maret 2010 sebesar 31,02 juta orang (13,33 persen), berarti jumlah penduduk miskin turun sebesar 1 juta orang (BPS 2012). Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) merupakan salah satu contoh daerah yang masih menghadapi permasalahan kemiskinan dan penanggulangan kemiskinan. Masih tingginya angka kemiskinan disetiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT, membuat provinsi ini terus dilanda permasalahan kemiskinan. Dalam perbandingan rata-rata tingkat kemiskinan di seluruh provinsi di Indonesia tahun 2007-2011, Provinsi NTT memiliki rata-rata kemiskinan 23,73 persen, dimana NTT menduduki peringkat ke tiga provinsi termiskin setelah Papua dan Maluku. Kondisi alam di Provinsi NTT tandus dan gersang.

Kekeringan, rawan pangan menjadi permasalahan rutin warga NTT. Kemiskinan, kasus gizi buruk, angka putus sekolah, serta akses fasilitas kesehatan yang kurang memadai menjadi mata rantai lanjutan dari persoalan. NTT memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang cukup besar dan beragam, namun sampai saat ini potensi setiap sektor tersebut belum secara optimal dapat memberikan nilai tambah yang signifikan untuk mensejahterakan rakyat dan daerah NTT. Hal ini disebabkan karena masih kurangnya investasi yang dilakukan.

Masih tingginya kemiskinan menunjukkan bahwa penanganan yang serius dari pemerintah maupun stakeholder sangat diperlukan untuk meminimalisir angka kemiskinan. Sejalan dengan adanya kebijakan otonomi daerah yang mulai diberlakukan sejak tahun 2001, pemerintah daerah kini berwenang penuh

merancang dan melaksanakan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan kebutuhannya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah tidak hanya melaksanakan program pembangunan tetapi juga bertanggung jawab secara langsung dan aktif dalam penanganan kemiskinan, sehingga untuk menanggulangi kemiskinan perlu dikaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kemiskinan, khususnya di NTT.

2.1.2.1 Pengertian Kemiskinan

Sebelum tahun 1993, BPS mendefinisikan garis kemiskinan makanan sebagai total pengeluaran yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan energi 2.100 kalori per kapita per hari (BPS, 1984). Kemiskinan dapat dicirikan keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, dan air minum, yang berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga Negara (Perpres Nomor 7 Tahun 2005 tentang RPJMN).

Chambers (1998) mengatakan bahwa kemiskinan adalah suatu integrated concept yang memiliki lima dimensi, yaitu: 1) kemiskinan (proper), 2) ketidakberdayaan (powerless), 3) kerentanan menghadapi situasi darurat (state of emergency), 4) ketergantungan (dependence), dan 5) keterasingan (isolation) baik secara geografis maupun sosiologis. Kemiskinan bukan hanya terkait kekurangan uang dan tingkat pendapatan rendah, tetapi juga hal lain, seperti: tingkat kesehatan, pendidikan rendah, perlakuan tidak adil dalam hukum, kerentanan

terhadap ancaman tindak kriminal, ketidakberdayaan menghadapi kekuasaan, dan ketidakberdayaan dalam menentukan jalan hidupnya sendiri.

2.1.2.2 Ukuran-Ukuran Kemiskinan

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS,2004), tingkat kemiskinan didasarkan pada jumlah rupiah konsumsi berupa makanan yaitu 2100 kalori per orang per hari dan konsumsi nonmakan. Patokan kecukupan 2100 kalori ini berlaku untuk semua umur, jenis kelamin, tingkat kegiatan fisik, berat badan, serta perkiraan status fisiologis ukuran penduduk, ukuran ini sering disebut juga dengan garis kemiskinan. Penduduk yang memiliki garis kemiskinan dibawah maka dinyatakan dalam kondisi miskin.

2.1.2.3 Kemiskinan Di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Perkembangan angka kemiskinan di Nusa Tenggara Timur mencerminkan beratnya beban pemerintah dalam pengentasan kemiskinan penduduknya. Berdasarkan data yang didapat dari BPS, kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi di provinsi NTT yaitu kabupaten Timor Tengah Selatan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2010 sebanyak 126.600 jiwa (28,69 persen) dari total penduduk 441.155 jiwa. Tingginya tingkat kemiskinan di Kabupaten Timor Tengah Selatan dikarenakan, secara topografis wilayah kabupaten TTS memiliki curah hujan yang rendah sehingga lahan di wilayah tersebut umumnya kering dan tandus, selain itu sektor pertanian (95,3 persen) masih memegang peranan penting karena sebagian besar penduduk bekerja dan mengandalkan hidupnya dari pertanian (Amelia, 2012).

Gambaran tingkat pendidikan penduduk wilayah kabupaten TTS memiliki tingkat pendidikan yang rendah, indikator ini dapat ditunjukkan dengan rata-rata lama sekolah pada tahun 2009 rata-rata lama sekolah Timor Tengah Selatan adalah 6,12 tahun berarti hanya menyelesaikan pendidikan sampai pada kelas enam SD. Sedangkan, untuk jumlah penduduk miskin terendah berada di Kota Kupang sebagai ibukota Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Menurut daerah tempat tinggal jumlah penduduk miskin dipedesaan lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Hal ini disebabkan penduduk diperkotaan umumnya bekerja di sektor sekunder maupun tersier sehingga memiliki pendapatan yang lebih banyak dibandingkan penduduk pedesaan yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan informal (Amelia, 2012).

2.1.2.4 Faktor Yang Mempengaruhi Kemiskinan di NTT

Secara umum faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kemiskinan antara lain : pertumbuhan ekonomi, pendidikan, pengangguran, kependudukan kesehatan (Siregar dan Wahyuniarti, 2008 ; Prasetyo, 2010 ; Wongdesmiwati, 2009 ; Myrdal, 2000). Hasil penelitian ini Amelia (2012) melaporkan bahwa faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi NTT yaitu : (a) pertumbuhan ekonomi, (b) jumlah penduduk yang lulus SMP, dan (c) angka harapan hidup berpengaruh negative sedangkan jumlah penduduk berpengaruh positif sedangkan, variabel tingkat pengangguran tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di NTT. Variabel jumlah penduduk dan angka harapan hidup mempunyai pengaruh yang besar terhadap penurunan tingkat kemiskinan dan

pertumbuhan ekonomi, dan jumlah penduduk lulusan SMP memiliki pengaruh yang relatif kecil terhadap penurunan tingkat kemiskinan.

2.1.3 Konsep Pertumbuhan Ekonomi

2.1.3.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sukirno (Prihastuti,2018) pertumbuhan Ekonomi adalah proses kenaikan output perkapita yang terus menerus dalam jangka panjang dan merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, makin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat.

Todaro (2003) dalam Prihastuti (2018) menyampaikan ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

- 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator untuk melihat kinerja perekonomian, baik di tingkat nasional maupun regional (daerah). Pada dasarnya, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan output agregat (keseluruhan barang dan jasa yang dihasilkan oleh kegiatan perekonomian) atau Produk Domestik Bruto (PDB). PDB sendiri merupakan nilai total seluruh output akhir yang dihasilkan oleh suatu perekonomian, baik yang dilakukan oleh warga lokal

maupun warga asing yang bermukim di negara bersangkutan. Sehingga, ukuran umum yang sering digunakan untuk melihat laju pertumbuhan ekonomi adalah persentase perubahan PDB untuk skala nasional atau persentase perubahan PDRB untuk skala provinsi atau kabupaten/kota (Nurmainah, 2013).

Pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan “teknologi” produksi itu sendiri, misalnya kenaikan output yang disebabkan oleh pertumbuhan stok modal ataupun penambahan faktor-faktor produksi tanpa adanya perubahan pada teknologi produksi yang lama (Rakhmawati, 2016).

2.1.3.2 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi

Cepat ataupun lambatnya perkembangan ekonomi di negara-negara disebabkan oleh kestabilan politik, kebijakan ekonomi pemerintah, kekayaan alam, jumlah tenaga kerja, kemampuan untuk mengembangkan teknologi. Adapun tahap-tahap perkembangan ekonomi menurut para ahli:

1. Frederich List

Frederich List berpendapat bahwa perkembangan ekonomi sebenarnya tergantung pada peranan pemerintah dan organisasi-organisasi swasta. Demikian pula lingkungan kebudayaan masyarakat mempunyai peranan penting bagi perkembangan ekonomi suatu bangsa (Rakhmawati, 2016).

2. Bruno Hilderbrand

Ia mengatakan bahwa perkembangan masyarakat atau ekonomi bukan dilihat dari sifat-sifat produksi (List) atau konsumsinya, tetapi lebih pada metode distribusi yang digunakan (Rakhmawati, 2016).

3. Karl Bucher

Perkembangan ekonomi menurut dia adalah melalui 3 (tiga) tingkat yaitu a) produksi untuk kebutuhan sendiri, b) perekonomian kota, dimana pertukaran sudah meluas, dan c) perekonomian nasional, dimana peranan pedagang-pedagang tampak makin penting (Rakhmawati, 2016).

2.1.3.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh David Ricardo, Ia menyatakan bahwa masyarakat ekonomi dibagi menjadi 3 golongan yaitu kapitalis, buruh, golongan tuan tanah. Maka pendapatan nasional dibagi menjadi 3 (upah, sewa, dan keuntungan), sehingga akan ada 2 penerimaan yaitu penerimaan bruto dan netto. Dengan kata lain apabila penerimaan netto tersebut diinvestasikan lagi akan mengakibatkan terjadinya perkembangan pertumbuhan ekonomi sangat penting karena pertumbuhan ekonomi didorong dengan peningkatan kapasitas produksi maka akan mempengaruhi jumlah produk barang dan jasa sehingga membuka kesempatan kerja dan tingkat kesejahteraan (Rakhmawati, 2016).

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan GDP (*Gross Domestic Product*) atau naiknya jumlah barang dan jasa yang dihasilkan dalam suatu negara dalam suatu tahun tertentu dengan menggunakan faktor-faktor produksi milik warga negaranya dan milik penduduk di negara-negara lain yang ada dalam suatu negara (Marunta, 2017). Berikut ini beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu :

1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik

Menurut Adam Smith sebagai ahli ekonomi klasik, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Kemudian menurut David Ricardo, bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan proses tarik-menarik antar dua kekuatan yaitu "*The Law of Deminishing Return*" dan kemajuan teknologi. Sedangkan menurut Mill, bahwa pembangunan ekonomi tergantung pada dua jenis perbaikan, yaitu perbaikan dalam tingkat pengetahuan masyarakat dan perbaikan yang berupa usaha-usaha untuk menghapus pengahambat pembangunan seperti adat istiadat dan kepercayaan.

Dari beberapa pendapat Ahli Ekonomi Klasik dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- 1) Tingkat perkembangan suatu masyarakat tergantung pada empat faktor, yaitu jumlah penduduk, jumlah stok modal, luas tanah, dan tingkat teknologi yang dicapai.
- 2) Kenaikan upah yang akan menyebabkan kenaikan penduduk.
- 3) Tingkat keuntungan merupakan faktor yang menentukan pembentukan modal.
Bila tidak terdapat keuntungan, maka akan mencapai "*Stationary State*", yaitu suatu keadaan dimana perkembanagan ekonomi tidak terjadi sama sekali.
- 4) *The law of deminishing return* berlaku untuk segala kegiatan ekonomi sehingga mengakibatkan pertambahan produk yang akan menurunkan tingkat upah, menurunkan tingkat keuntungan, tetapi menaikkan tingkat sewa tanah (Marunta, 2017).

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neo-Klasik

Pada pertengahan tahun 1950-an berkembang teori pertumbuhan Neo-Klasik yang merupakan suatu analisis pertumbuhan ekonomi yang didasarkan pada pandangan-pandangan ahli ekonomi klasik. Perintisnya adalah Solow, kemudian diikuti dan dikembangkan oleh Edmund Philips, Harry Johson, dan JE Meade. Pendapat-pendapat para ahli tersebut yaitu:

- 1) Adanya akumulasi kapital yang merupakan faktor penting dalam kegiatan pembangunan ekonomi.
- 2) Perkembangan merupakan proses yang gradual.
- 3) Perkembangan merupakan proses yang harmonis dan kumulatif.
- 4) Adanya pikiran yang optimis terhadap perkembangan.
- 5) Aspek internasional yang merupakan faktor bagi perkembangan.

Selanjutnya menurut Solow, yang menjadi faktor terpenting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi bukan hanya pertambahan modal dan tenaga kerja. Namun faktor yang terpenting adalah kemajuan teknologi dan pertambahan kemahiran dan kepakaran tenaga kerja (Marunta, 2017).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern

1) Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Rostow

Rostow mengartikan pembangunan ekonomi sebagai suatu proses yang menyebabkan perubahan dalam masyarakat, yaitu perubahan politik, struktur sosial, nilai sosial dan struktur kegiatan ekonominya dan dalam bukunya yaitu *"The Stages of economic"* (1960), Rostow mengemukakan tahap-tahap dalam

proses pembangunan ekonomi yang dialami oleh setiap negara pada umumnya kedalam lima tahap yaitu:

- a. *The Traditional Society*(masyarakat tradisional)
- b. Persyaratan tinggal landas
- c. Tinggal landas
- d. Menuju kematangan
- e. Tingkat konsumsi masyarakat yang tinggi.

2) Teori Pertumbuhan Ekonomi Modern Menurut Kuznet

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai jangka panjang untuk menyediakan berbagai jenis barang ekonomi yang terus meningkat kepada masyarakat. Kemampuan ini tumbuh berdasarkan kemajuan teknologi, institusional, dan ideologis yang diperlukannya.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Antar Kemiskinan dengan Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu hal yang bisa dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kemiskinan adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pembangunan manusia. Dalam hal ini, pembangunan manusia di *proxy* dengan IPM atau *Human Development Index* (HDI) yang merupakan suatu indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, mau-pun aspek ekonomi. Di mana IPM merupakan indeks pengembangan manusia yang dilihat dari sisi perluasan,

pemerataan, dan keadilan baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun kesejahteraan masyarakat,(Todaro, 2000).

2.2.2 Hubungan Antar Pertumbuhan Ekonomi dengan IPM

Pembangunan manusia berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung melalui demokrasi. Pengaruh langsung terhadap pertumbuhan dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Bank Dunia (1993) dan Bank Pembangunan Asia (1997), menemukan bahwa tingkat melek huruf yang tinggi, tingkat kematian bayi yang rendah, dan tingkat kesenjangan dan kemiskinan yang rendah memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi yang cepat di Asia Timur dan Tenggara,(Yulianti, 2016).

2.3 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Denni Sulistio Mirza (2011)	Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Belanja Modal Terhadap Ipm Jawa Tengah	Regresi Linear Berganda	Pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2006-2009 diperoleh hasil bahwa kemiskinan mempunyai pengaruh negatif dan signifikan pada taraf 5% terhadap IPM di Provinsi Jawa Tengah yang berarti kemiskinan yang semakin menurun maka Indeks Pembangunan Manusia semakin meningkat. Berdasarkan nilai koefisiennya yang bertanda negatif, dapat disimpulkan bahwa apabila tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1% maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia Sebesar 0,208. Signifikansi variabel kemiskinan terhadap IPM ditunjukkan pada probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada taraf 5%.
2	Ahmad Syaifullah, Nazaruddin Malik (2017)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Asean-4	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dengan nilai probabilitas sebesar 0,1149. Kemudian, Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di ASEAN-4 dengan nilai probabilitas 0,0000.

3	Adelfina, I Made Jember (2016)	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Kabupaten Kota Provinsi Bali Periode 2005 – 2013	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial variabel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel kemiskinan berpengaruh negatif signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di provinsi Bali periode 2005-2013, secara parsial variabel Belanja Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013. Secara simultan variabel pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, dan Belanja Daerah berpengaruh signifikan terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Bali periode 2005-2013.
4	Rizaldi Zakaria (2017)	Pengaruh Tingkat Jumlah Penduduk, Pengangguran, Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi Dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010-2016	Regresi Linear Berganda	Hasil regresi terbaik menggunakan metode data panel <i>Fixed Effect Model</i> diketahui bahwa variabel Tingkat Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pengangguran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Kemiskinan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap IPM, variabel Tingkat Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap IPM, sedangkan variabel Tingkat Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap IPM pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah.

5	Desi Yulianti (2016)	Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia, Pertumbuhan Ekonomi, Pengangguran dan Upah Terhadap Kemiskinan di Provinsi DIY Periode Tahun 2017-2013 (Dalam Perspektif Ekonomi Syariah)	Regresi Linear Berganda	Hasil penelitian menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia dan upah berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan, sedangkan pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kemiskinan.
---	----------------------	--	-------------------------	---

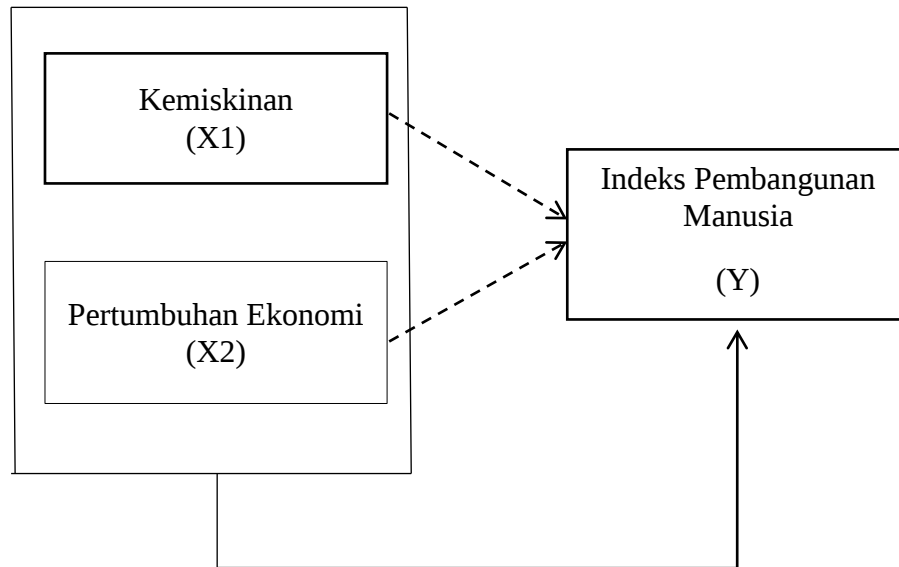
Sumber: Diolah 2019

2.4 Kerangka Pikiran Teoritis

Dalam penelitian ini akan dianalisis mengenai Pengaruh Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTT. Pemerintah tidak cukup hanya mencapai tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan itu sendiri. Tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar lapangan pekerjaan dengan tujuan semata-mata untuk mengurangi jumlah kemiskinan atau memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.

Dalam penelitian ini, variabel-variabel yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah besarnya Kemiskinan serta Pertumbuhan ekonomi karena faktor-faktor ini merupakan faktor yang diyakini berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Salah satu tolak ukur yang digunakan dalam melihat kualitas hidup manusia adalah Indeks Pembangunan Manusia Skema itu dapat dilihat seperti paada gambar dibawah ini:

Gambar 2.1
Kerangka Pikiran Teoritis



Keterangan:

-----> Parsial
 —————> Simultan

2.5 Hipotesis Skripsi

Dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis guna memberikan arah dan pedoman dalam melakukan penelitian. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Diduga Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara parsial, signifikan dan positif (+) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT.
2. Diduga Kemiskinan dan Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh secara simultan, signifikan dan Positif (+) terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi NTT.